

Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kecamatan Kubung

Ridhatul Kairoot, Muhammad Prima Ersya
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang
E-mail: ridha061116@gmail.com

ABSTRAK

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan maupun pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan dan mematuhi aturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kubung. Pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dan dibagi berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 secara umum berada pada angka 3,40 dari rentang 1 sampai 5 dan secara kontinu tergolong pada kategori kurang percaya.

Kata Kunci: kepercayaan publik, kebijakan pemerintah, Covid-19

ABSTRACT

Public trust in a policy and the government as the party issuing the policy is related to community involvement in implementing policies and complying with government regulations. This study aims to describe the level of public trust in the implementation of the Covid-19 handling policy carried out by the Government. This type of research is quantitative research using descriptive methods. The technique of data collection is done by distributing questionnaires. The population in this study is the community of Kubung District. Sampling using the Cluster Sampling technique with a total sample of 100 respondents and divided based on the level of public education. The data analysis technique used descriptive statistical analysis techniques. The results showed that the level of public trust in the government in implementing policies to deal with Covid-19 was generally at 3.40 from a range of 1 to 5 and was classified as a continuum in the category of lack of trust.

Keywords: public trust, government policy, Covid-19



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Kemunculan wabah *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal dengan Covid-19 diakhir tahun 2019 di wilayah Wuhan China mengkhawatirkan seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini disebabkan karena penyebarannya yang begitu cepat. Penyebaran Covid-19 bisa terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus Covid-19 melalui sekresi air liur atau *droplet* saluran pernafasan yang keluar saat orang terinfeksi tersebut batuk, bersin, berbicara ataupun menyanyi. *Droplet* dari orang yang terinfeksi virus Covid-19 dapat mencapai mulut, hidung serta mata orang yang rentan dan tidak memakai pelindung diri, yang menyebabkan ia tertular virus tersebut. Transmisi Covid-19 juga terjadi melalui kontak tidak langsung atau disebut juga transmisi fomit yaitu penyebaran Covid-19 melalui permukaan dan benda yang telah terkontaminasi virus ini (WHO, 2020).

Berbagai media transmisi Covid-19 menyebabkan penyebaran virus ini terjadi secara cepat dan *massive*. Pada 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia mendeklarasikan peristiwa penyebaran Covid-19 sebagai pandemi global. Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020 (Indonesia.go.id, 2020). Sejak awal kemunculannya di Indonesia, jumlah kasus positif Covid-19 tercatat terus mengalami peningkatan.

Penyebarannya yang cepat dan *massive* di berbagai wilayah menjadi dasar bagi pemerintahan di setiap

negara mengeluarkan kebijakan penanganan kasus Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa hanya sebatas kebijakan parsial atau dilakukan sendiri-sendiri dan setengah-setengah. Kebijakan yang sebaiknya dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang komprehensif dan terpadu. Kebijakan yang komprehensif adalah kebijakan yang ditetapkan setelah mengkaji akar permasalahan dari awal kemunculan hingga akhir. Dalam hal ini harus dikaji terlebih dahulu penyebab awal kemunculan, media penularan, memetakan wilayah dan warga yang terdampak, cara memutus mata rantai penyebaran sampai kepada penemuan vaksin (Mufti *et al.* 2020).

Sementara kebijakan terpadu menuntut setiap pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga terkait untuk satu alur koordinasi. Namun faktanya banyak ditemukan kasus diskoordinasi dan disharmonisasi antara satu pihak dengan pihak lain. Contohnya pada pertengahan Maret 2020, pemerintah pusat menolak untuk melakukan isolasi wilayah karena hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan migrasi manusia, namun kenyataannya ada beberapa wilayah yang menerapkan *lockdown* tanpa persetujuan pemerintah pusat yaitu daerah Bali, Papua, Solo, Maluku dan Tegal (CNN Indonesia, 2020).

Selain ditemukannya miskoordinasi dan disharmonisasi antara satu pihak dengan pihak lain, pada awal kemunculannya banyak narasi-narasi terkait virus ini yang disuarakan oleh para elit politik

seperti narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa "Masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus korona, enjoy saja" (Satria 2020).

Narasi-narasi negatif juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) yang mengatakan bahwa "*Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus korona pun tak bisa masuk*" (Garjito & Aditya, 2020). Menteri Perhubungan menyampaikan kelakarnya yang lain di tempat berbeda, dengan menyatakan bahwa: "*Bangsa Indonesia kebal virus korona karena doyan nasi kucing*" (Saubani, 2020).

Narasi-narasi yang disampaikan oleh elit-elit politik memunculkan dua stigma berbeda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hasil penelitian dari Idris *et al* (2020) mengatakan bahwa sejak awal pemerintah pusat terkesan menyepelkan Pandemi Covid-19 dan pemerintah terkesan seperti tidak waspada dan bersiap dari awal akan dampak Covid-19. Selain itu, narasi-narasi yang disampaikan menunjukkan ketidaktanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak negara. Sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipatif dan adaptif struktur birokrasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan (Agustino, 2020).

Stigma yang telah terbentuk di masyarakat sejak awal kemunculan mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan penanganan Covid-19. Hal ini didukung dengan pendapat Halim

(2020) yang mengatakan bahwa stigma awal yang telah terbentuk berdampak pada munculnya beragam individu yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam pencegahan Covid-19. Hal ini karena kebijakan pencegahan Covid-19 berbasis masyarakat, dimana masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam menjalankan himbuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti himbuan untuk tetap tinggal dirumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah, menjaga jarak, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dan lain sebagainya (Mufti *et al*, 2020). Dalam menjalankan himbuan-himbauan inilah dibutuhkan kepercayaan masyarakat agar himbuan tersebut dapat terlaksana dengan semestinya dan dapat tercapai tujuan dari dikeluarkannya himbuan tersebut.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 merupakan bagian dari aktivitas masyarakat terkait kebijakan (Mufti *et al*. 2020). Menurut Randall B. Ripley dalam (Surbakti, 1992) aktivitas masyarakat yang menyangkut kebijakan akan selalu memberi pengaruh terhadap aktivitas pemerintah. Dimana pemerintah yang akan menetapkan kebijakan, dan masyarakat yang mendapatkan

dampak dari kebijakan yang ditetapkan tersebut. Dalam artian siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan itu. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang berhubungan dengan kepercayaan (Mufti *et al.* 2020).

Bupati Solok Periode 2016-2021 Bapak Gusmal dalam REPUBLIKA.co.id (2020) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat Kabupaten Solok dalam mengikuti kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi penyebaran Covid-19 masih rendah. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah kasus positif disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Solok masih bandel, tidak disiplin, tidak patuh dan masih banyak yang tidak mau mendengar ajakan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kondisi yang digambarkan oleh Bupati ini ditemukan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, tidak terkecuali Kecamatan Kubung yang menjadi lokasi penelitian. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan terkait penanganan Covid-19 mengindikasikan terdapat permasalahan dalam kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk

menjawab pernyataan-pernyataan penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Kubung. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin dengan persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir adalah sebesar 10% maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Responden dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan tingkat pendidikan, dengan jumlah masing-masing kelompok yaitu:

Tabel 1 Jumlah responden

No	Tingkat Pendidikan	Jml Responden
1	Tidak Tamat SD	13
2	SD	20
3	SMP	25
4	SMA	29
5	Diploma/Sarjana	13
	Total	100

Dalam menyusun instrumen penelitian, variabel yang menjadi acuan utama peneliti dalam menyusun angket ialah tentang kepercayaan masyarakat. Sedangkan cara dalam menganalisis data yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan metode garis kontinum. Metode garis kontinum ini menggunakan perhitungan skor yang dijelaskan pada rumus berikut ini:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Banyak Kelas}}$$

- Nilai maksimal = 5
- Nilai minimal = 1
- Banyak kelas = 5

$$\text{Jadi, interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

3,11, berdasarkan aturan garis kontinum nilai ini berada pada kategori kurang percaya. Nilai rata-rata kepercayaan masyarakat untuk tingkat pendidikan SMA berada pada angka 3,80, berdasarkan aturan garis kontinum nilai ini berada pada kategori percaya. Terakhir, nilai rata-rata kepercayaan masyarakat pada tingkat pendidikan Diploma/Sarjana berada pada angka 3,92, berdasarkan aturan garis kontinum nilai ini berada pada kategori percaya.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 secara tidak langsung menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan menaati kebijakan penanganan Covid-19 juga masih rendah. Dimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam menaati pemerintah dan kebijakannya.

Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan menaati kebijakan penanganan Covid-19 merupakan suatu bentuk dari partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mufti *et al* (2020) yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang berhubungan dengan kepercayaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Kubung belum sepenuhnya memiliki partisipasi politik yang baik atau memiliki partisipasi politik yang pasif. Hal ini tergambar dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam

menjalankan kebijakan penanganan Covid-19.

Menurut Lidya (2018) partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut karena ia dapat mengembangkan pola pikirnya dalam menentukan sikap dan pilihan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan senantiasa terlibat atau berpartisipasi dalam menaati dan menjalankan himbuan dari pemerintah, karena masyarakat tersebut menyadari bahwa himbuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti terkandung manfaat didalamnya, terkhusus himbuan dalam penanganan Covid-19.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Randall B. Ripley dalam (Surbakti, 1992) aktivitas masyarakat yang menyangkut tentang kebijakan akan selalu memberi pengaruh terhadap aktivitas pemerintah. Dimana pemerintah yang akan menetapkan kebijakan, dan masyarakat yang mendapatkan dampak dari kebijakan yang ditetapkan tersebut. Dalam artian siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan itu.

Menurut Dwiyanto dalam (Hendiyani, 2019) tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah mengakibatkan masyarakat menjadi sulit untuk menerima segala sesuatu yang diinformasikan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Kubung belum mempercayakan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 kepada pemerintah. Kondisi ini menyatakan secara tidak langsung

bahwa masyarakat Kecamatan Kubung belum sepenuhnya terlibat dalam usaha percepatan penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh pemerintah.

Denhardt (dalam Ningtyas, 2018) mengatakan bahwa ketika pemerintah mampu menghasilkan kebijakan maupun memberikan pelayanan publik secara optimal, maka kinerja pemerintah akan diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 berada pada kategori kurang percaya. Oleh karena itu pemerintah belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan yang mendorong percepatan penanganan Covid-19 secara optimal sebagai upaya memulihkan kondisi krisis kesehatan pada saat sekarang ini.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Kubung kurang percaya terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata tanggapan keseluruhan responden terkait kepercayaannya kepada pemerintah yaitu 3,40. Sesuai dengan aturan garis kontinum nilai ini berada pada kategori kurang percaya. Dari hasil tersebut secara tidak langsung juga tergambar bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan yang mendorong percepatan penanganan Covid-19 secara optimal sebagai

upaya memulihkan kondisi krisis kesehatan pada saat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. Vol 6. No 2.
- CNN Indonesia. 2020. Lockdown Daerah, Simbol Karut Marut Penanganan Corona. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona> 21 September 2021.
- Garjito, D., & Aditya, R. (2020). Kelakar Menteri Airlangga: Izinnya Berbelit-belit, Virus Corona Tak Masuk. <https://www.suara.com/news/2020/02/15/141802/kelakar-menteri-airlangga-izinnya-berbelit-belit-virus-corona-tak-masuk?page=all> diakses tanggal: 21 September 2021.
- Halim, D. 2020. 6 Bulan Pandemi Covid-19: Hoaks dan Teori Konspirasi yang Memperparah Penanganan. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/09090921/6-bulan-pandemi-covid-19-hoaks-dan-teori-konspirasi-yang-memperparah?page=all> diakses tanggal: 21 September 2021
- Hendiyani, M. F. 2019. Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Kreatif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*.

- Idris, Ika K et al. 2020. Kepercayaan Terhadap Informasi dari Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19. *CSIS Indonesia*, Pakarti Centre Building, Indonesia.
- Indonesia.go.id. 2020. Kasus Covid-19 Pertama: Masyarakat Jangan Panik
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses tanggal 20 Mei 2020.
- Lidya, 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Merdeka.com. 2020. Mengapa Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Penyebaran Covid.19?
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-masih-banyak-masyarakat-tidak-percaya-penyebaran-covid-19.html>
- Mufti, Muslim et al. 2020. *Analisis Pengukuran Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Kekuatan bagi Penanganan COVID-19 Berbasis Masyarakat*. Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ningtyas, T. 2018. Kepercayaan Masyarakat Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. Volume 2. Nomor 1
- REPUBLIKA. 2020. Pemkab Solok: Kepedulian pada Protokol Covid-19 Masih Rendah.
<https://republika.co.id/berita/qhshka284/pemkab-solok-kepedulian-pada-protokol-covid19-masih-rendah>
- Saubani, A. (2020). Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing. (Republika Online, 17 Februari 2020).
<https://republika.co.id/berita/q5ul4k409/kelakar-menhub-kita-kebal-corona-karena-doyan-nasi-kucing>
- Satria, J.N. (2020). Minta Masyarakat Tak Panik soal Penyebaran Virus Corona, Menkes: Enjoy Saja. (Detik Online, 27 Januari 2020).
<https://news.detik.com/berita/d-4874858/minta-masyarakat-tak-panik-soal-penyebaran-virus-corona-menkes-enjoy-saja>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- World Health Organization (WHO). 2020. *Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi*.
<https://www.who.int>.